



BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- u. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan



- ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- ll. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati lumajang nomor 70 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
- mm. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN SUKODONO

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Sukodono
- 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja



BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
- 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos-pos Luar Biasa
 - e. Surplus (Defisit) LO
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP



BAB II

IKHTISAR PENCAAIAN KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN SUKODONO

2.1. IKHTISARREALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN SUKODONO

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD Kecamatan Sukodono Tahun 2019 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh OPDKecamatan Sukodono meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

TABEL II-2.1.1

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN – BELANJA TAHUN 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	Sisa Anggaran Rp.
1	2	4	5	6	7
1	BelanjaOperasi	2.285.566.909,00	2.251.740.181,00	98,52	33.826.728,00
2	Belanja Modal	153.650.000,00	153.247.000,00	99,74	403.000,00
	Jumlah Belanja	2.439.216.909,00	2.404.987.181,00	98,60	34.229.728,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL II-2.1.2

PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2015–2019

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	1.109.600.162	1.169.857.932	312.044.108	1.131.238.863	1.410.461.404
Belanja Barang	336.338.506	521.078.752	618.351.295	805.283.259	841.278.777
Belanja Modal	192.536.000	1.357.644.920	131.014.000	97.850.000	153.247.000
Jumlah	1.638.474.668	3.048.581.604	1.061.409.403	2.034.372.122	2.404.987.181
% Kenaikan		186%	35%	192%	118%

Belanja tiap tahun mengalami kenaikan sebagaimana pada Tabel II-2 sehingga perlu kami beri penjelasan sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 ada kenaikan 186% dikarenakan pada tahun 2016 Kecamatan Sukodono ada pembangunan gedung kantor .
- Tahun 2017 ada penurunan dari tahun 2016 disebabkan pembayaran gaji tahun 2017 dilakukan oleh BPKD dan mulai bulan September gaji di bayarkan melalui OPD.
- Untuk belanja barang tiap tahun mengalami kenaikan dikarenakan kebutuhan belanja tiap tahun semakin meningkat dengan harga juga semakin mahal dan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna melengkapi kebutuhan kantor agar pelaksanaan pelayanan lebih maksimal.
- Pada tahun anggaran 2019 kenaikan 118 % disebabkan adanya tunjangan TPP untuk PNS yang sebelumnya berupa tunjangan tambahan uang makan berubah menjadi tambangan perbaikan penghasilan (TPP).

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL II- 2.2.1
REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2019

Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1 : Pelayanan administrasi dan Operasional perkantoran

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	BELANJA PEGAWAI	20.200.000	20.200.000	Realisasi digunakan untuk:	
				Honorarium Pengadaan - Barang/Jasa	3.700.000
				Honorarium Pengurus - Barang	2.100.000
				Honorarium Penerima - hasil pekerjaan	600.000
				Honorarium Pengguna - anggaran	4.800.000
				Honorarium pejabat - pelaksana teknis keg	2.400.000
				- Uang Lembur PNS	6.600.000
2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.129.000	189.063.377	Belanja Alat Tulis - Kantor (ATK)	22.488.000
				Belanja Alat Listrik dan - Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)	2.000.000
				Belanja Perangko, - materai, dan benda pos lainnya	750.000
				Belanja Peralatan - Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.188.000
				- Belanja Air	369.100
				- Belanja Listrik	27.436.470
				Belanja Kawat/Faximili/ - Internet	8.936.391
				Belanja Premi Asuransi - Ketenagakerjaan	2.130.816
				- Belanja Cetak	1.200.000
				Belanja - Penggandaan/Foto Copy/Penjilidan/Penyampulan	5.834.600
				Belanja Makanan dan - Minuman Rapat	29.250.000
				- belanja pakaian khusus	8.050.000
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.500.000
				- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



				Belanja Upah/Ongkos	
				- Tenaga Kerja Bulanan	39.600.000
				Belanja Tambahan	
				- Upah Tenaga Kerja Bulanan	2.880.000
JUMLAH		217.329.000	209.263.377		

PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan 1 : Pembangunan Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000	18.750.000	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Meubelair 18.000.000 - Belanja Home use 750.000
2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	133.650.000	133.450.000	Belanja Modal Alat Alat 1.600.000 - Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal 47.300.000 - Meubelair Belanja Modal Alat 18.000.000 - Pendingin Belanja Modal Home 6.000.000 - Use Belanja Modal personal 15.000.000 - Komputer Belanja Modal 3.000.000 - Peralatan Personal Komputer Belanja Modal office 27.200.000 - use Belanja Modal electric 15.350.000 - generating set
3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	20.000.000	19.797.000	Belanja Modal 19.797.000 - Bangunan gedung Kantor
JUMLAH		172.400.000	171.997.000	

Kegiatan 2 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG DAN JASA	89.250.000	87.958.900	Realisasi digunakan untuk: Belanja Bahan Bakar 23.150.000 - Minyak dan Pelumas Belanja Jasa Servis dan 28.000.000 - Penggantian Suku Cadang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



				Belanja STNK	1.208.900
				- Kendaraan Dinas/Operasional	
				Belanja Pemeliharaan	4.200.000
				- Alat Pendingin	
				Belanja Pemeliharaan	8.400.000
				- Personal Komputer	
				Belanja Pemeliharaan	5.000.000
				- Peralatan Personal Komputer	
				Belanja Upah/Ongkos	18.000.000
				- Tenaga Kerja Bulanan	
JUMLAH		89.250.000	87.958.900		
JUMLAH PROGRAM 2		261.650.000	259.955.900		

PROGRAM 3 : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1-	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	2.400.000	Realisasi digunakan untuk: Uang Lembur PNS 2.400.000 -
2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000	72.000	Belanja Cetak Dan - penggandaan 72.000
JUMLAH		2.472.000	2.472.000	

Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000	1.200.000	Realisasi digunakan untuk: Uang Lembur PNS 1.200.000 -
2	BELANJA BARANG DAN JASA	412.000	412.000	Belanja Cetak Dan - penggandaan 412.000
JUMLAH		1.612.000	1.612.000	

Kegiatan 3 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	2.400.000	Realisasi digunakan untuk: Uang Lembur PNS 2.400.000 -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.740.000	6.540.000	Belanja	390.000
				- Penggandaan/Foto copy/penjilidan/penyempulan	
				Belanja Perjalanan	5.750.000
				- Dinas luar Daerah	
				Belanja Tambahan	400.000
				- Upah Tenaga Kerja Bulanan	
JUMLAH		9.140.000	8.940.000		
JUMLAH PROGRAM 3		13.224.000	13.024.000		

Program 4 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
Kegiatan 1 : Fasilitas Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	BELANJA PEGAWAI	9.200.000	9.200.000	Realisasi digunakan untuk:	
				Honorarium tim teknik kegiatan	9.200.000
2	BELANJA BARANG DAN JASA	292.335.000	292.335.000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000
				Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah	23.175.000
				Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan	259.200.000
				Belanja Tambahan Upah tenaga Kerja bulanan	5.760.000
JUMLAH		301.535.000	301.535.000		

Kegiatan 2 : Fasilitas Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	BELANJA BARANG DAN JASA	16.300.000	16.287.500	Realisasi digunakan untuk:	
				Belanja penggantian transport	7.200.000
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000
				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.087.500
JUMLAH		16.300.000	16.287.500		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Kegiatan 3 Fasilitas Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	BELANJA BARANG DAN JASA	179.880.000	179.880.000	Realisasi digunakan untuk:	
				belanja dekorasi	8.500.000
				-	
				belanja penggantian	2.250.000
				- transport	
				Belanja jasa	2.700.000
				- instruktur/narasumber/ tenaga ahli	
				Belanja jasa pendukung	400.000
				- kegiatan	
				Belanja jasa juri/wasit	3.000.000
				-	
				Belanja sewa sarana	1.400.000
				- mobilitas darat	
				Belanja sewa alat studio	1.500.000
				-	
Belanja sewa tenda dan	3.000.000				
- perlengkapannya					
Belanja makanan dan	33.625.000				
- minuman rapat					
Belanja makanan dan	44.550.000				
- minuman kegiatan tertentu					
Belanja perjalanan	41.100.000				
- dinas dalam daerah					
Belanja perjalanan	12.575.000				
- dinas dalam daerah					
Belanja upah/ongkos	20.400.000				
- tenaga bulanan					
Belanja tambahan upah	2.880.000				
- tenaga kerja bulanan					
Belanja hadiah barang	2.000.000				
-					
JUMLAH		179.880.000	179.880.000		

Kegiatan 4 : Fasilitas dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA PEGAWAI	1.162.000	1.154.000	Realisasi digunakan untuk:
				Uang lembur PNS
2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.220.000	2.220.000	Realisasi digunakan untuk:
				Belanja dekorasi
				-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



				Belanja pengandaan/ - foto copy /penjilidan /penyampulan	340.000
				Belanja makanan dan - minuman rapat	1.500.000
				Belanja tambahan upah - tenaga kerja bulanan	280.000
JUMLAH		3.382.000	3.374.000		

Kegiatan 5 : Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
-	BELANJA PEGAWAI	6.940.000	6.910.000	Realisasi digunakan untuk: Uang lembur PNS 6.910.000 -
-	BELANJA BARANG DAN JASA	47.760.000	47.760.000	Belanja upah/ongkos 42.000.000 - tenaga kerja bulanan Belanja tambahan upah 5.760.000 - tenaga kerja bulanan
JUMLAH		54.700.000	54.670.000	
JUMLAH PROGRAM 4		555.797.000	555.746.500	
JUMLAH TOTAL		1.048.000.000	1.037.989.777	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Posisi keuangan OPD Kecamatan Sukodono selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**TABEL II-2.3.1
PERKEMBANGAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015 S.D. 2019**

Posisi Keuangan	2015	2016	2017	2018	2019
1. Aset	844.728.851,07	2.144.823.806,03	2.126.500.306,03	2.241.790.306,03	2.200.193.950,08
2. Kewajiban	81.250,00	1.429.634,00	3.324.764,00	30.153.000,00	44.314.953,00
3. Ekuitas	844.647.601	2.143.394.172	2.123.175.542	2.211.637.306	2.155.878.997,08
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	844.728.851,07	2.144.823.806,03	2.126.500.306,03	2.241.790.306,03	2.200.193.950,08

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJAKEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK OPD Kecamatan Sukodono belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK OPD Kecamatan Sukodono tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sukodono menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan



secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. OPD Kecamatan Sukodono masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset OPD Kecamatan Sukodono melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA OPDKecamatan Sukodono mencakup LRA dan belanja:

A. BELANJA DAERAH

TABEL. III-3.1.1
REALISASI BELANJA TAHUN 2019

Belanja	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
Belanja Daerah	2.439.216.909,00	2.404.987.181,00	2.034.372.122,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2019 sebesar 2.404.987.181,00. Realisasinya mencapai 98,60% dari anggaran sebesar 2.439.216.909,00. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi belanja Tahun 2019 hampir sama 98 %.

B. BELANJA OPERASI

TABEL. III-3.1.2
REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2018

Belanja	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
Belanja Operasi	2.285.566.909	2.251.740.181	1.936.522.122

Belanja operasi pada OPD Kecamatan Sukodono terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL. III-3.1.3
REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2019 DAN 2018

NO	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.434.718.909	1.410.461.404	98,31	1.131.238.863
2	Belanja Barang dan Jasa	850.848.000	841.278.777	98,88	805.283.259
	Jumlah Belanja	2.285.566.909	2.251.740.181	98,52	1.936.522.122

TABEL. III-3.1.4
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019 DAN 2018

NO	Rincian Obyek Belanja	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.434.718.909	1.410.461.404	98,31	1.131.238.863

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Sukodono.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.5
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019 DAN 2018

NO	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji dan Tunjangan	941.631.613	935.687.501	99,37%	915.843.413
	Gaji Pokok	737.239.683	733.854.241	99,54%	716.406.462
	Tunj keluarga	70.609.922	69.525.472	98,46%	62.742.896
	Tunj jabatan	74.955.010	74.740.000	99,71%	81.310.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



	Tunj fungsional umum	16.608.000	16.490.000	99,29%	15.050.000
	Tunj beras	35.102.340	34.689.180	98,82%	34.471.920
	Tunj PPh/Tj Khusus	521.626	308.195	59,08%	186.694
	Pembulatan gaji	12.988	10.103	77,79%	6.746
	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	6.582.044	6.070.310	92,23%	5.668.695
2	Tambahan penghasilan PNS	449.585.296	431.309.903	95,94%	129.923.450
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	449.585.296	431.309.903	95,94%	60.027.125
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.391.216.909	1.366.997.404	98,26%	1.045.766.863
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.700.000	3.700.000	100%	8.000.000
2	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	2.100.000	2.100.000	100%	40.650.000
3	Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang	600.000	600.000	100%	3.900.000
4	Honorarium Penerima hasil pekerjaan	4.800.000	4.800.000	100%	1.600.000
5	Honorarium Petugas Siak	2.400.000	2.400.000	100%	9.600.000
6	Uang Lembur PNS	29.902.000	29.864.000	99,87%	31.322.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	43.502.000	43.464.000	99,91%	95.072.000
	Jumlah Belanja Pegawai	1.434.718.909	1.410.461.404	98,31%	1.140.838.863

TABEL. III-3.1.6

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2019 DAN 2018

NO	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	850.848.000	841.278.777	99%	805.283.259

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut :

TABEL. III-3.1.7
REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2019 DAN 2018

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Persediaan	204.949.600	204.949.600	100%	259.939.500
2	Belanja Jasa	474.148.400	466.082.777	98,30%	379.046.059
3	Belanja Pemeliharaan	71.250.000	69.958.900	98,19%	89.977.700
4	Belanja Perjalanan Dinas	81.750.000	81.537.500	99,74%	69.520.000
5	Belanja Lainnya	18.750.000	18.750.000	100%	6.800.000
	Jumlah	850.848.000	841.278.777	98,88%	805.283.259

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja;

Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 204.949.600,00 terinci sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.8
REALISASI BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2019

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	22.488.000	22.488.000
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	2.000.000	2.000.000
3	Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya	750.000	750.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.188.000	3.188.000
5	Belanja cetak	1.200.000	1.200.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



6	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	7.048.600	7.048.600
7	Belanja makanan dan minuman rapat	72.575.000	72.575.000
8	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan tertentu	44.550.000	44.550.000
9	Belanja pakaian khusus	8.050.000	8.050.000
10	Belanja Pakaian kegiatan tertentu	41.100.000	41.100.000
11	Belanja hadiah barang	2.000.000	2.000.000
	Jumlah	204.949.600	204.949.600

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.466.082.777,00 dengan rincian sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.9
REALISASI BELANJA JASA TAHUN 2019

No	Belanja jasa	Anggaran	Realisasi
1	Belanja air	900.000	369.100
2	Belanja listrik	34.300.000	27.436.470
3	Belanja kawat/faksimili/ internet	9.600.000	8.936.391
4	Belanja Dekorasi	8.600.000	8.600.000
5	Belanja Penggantian Transport	9.450.000	9.450.000
6	Belanja jasa instruktur/ narasumber/ tenaga ahli	2.700.000	2.700.000
7	Belanja Jasa Pendukung kegiatan	400.000	400.000
8	Belanja jasa juri/wasit	3.000.000	3.000.000
9	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.400.000	1.400.000
10	Belanja sewa alat studio	1.500.000	1.500.000
11	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	3.000.000	3.000.000
12	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2.138.400	2.130.816
13	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	379.200.000	379.200.000
14	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	17.960.000	17.960.000
	Jumlah	474.148.400	466.082.777



(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.69.958.900,00terinci sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.10
REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN 2019

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	23.150.000	23.150.000
2	Belanja Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang	28.000.000	28.000.000
3	Belanja STNK Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000	1.208.900
4	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	4.200.000	4.200.000
5	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	8.400.000	8.400.000
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000	5.000.000
	Jumlah	71.250.000	69.958.900

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 81.537.500,00terinci sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.11
REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TAHUN 2019

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.350.000	62.337.500
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.400.000	19.200.000
	Jumlah	81.750.000	81.537.500

**(5) Belanja Lainnya**

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 18.750.000,00 terinci sebagai berikut.

TABEL. III-3.1.12
REALISASI BELANJA LAINNYA TAHUN 2019

No.	Belanja Lainnya	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Meubelair	18.000.000	18.000.000
2	Belanja Home use	750.000	750.000
	Jumlah	18.750.000	18.750.000

Belanja lainnya terdiri dari belanja meubelair(berupa kursi lipat) dan home use(berupa taplak meja) yang akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukodono.

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
C.Belanja Modal	153.650.000	153.247.000	97.850.000

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan.

Realisasi belanja modal tahun 2019 sebagai berikut :

TABEL. III-3.1.13
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.650.000	133.450.000	99,85	97.850.000-
2	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	20.000.000	19.797.000	98,98	
	Jumlah	153.650.000	153.247.000	99,73	

Belanja modal peralatan dan mesin terdiri atas belanja modal electric generating set sebesar Rp. 15.350.000,00 berupa genset yang digunakan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



untuk persiapan listrik padam.

Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.600.000,00 berupa filling cabinet,

Belanja modal office uset sebesar Rp. 27.200.000,00 berupa backdrop tulisan "PATEN" yang digunakan sebagai pelengkap di ruang pelayanan umum.

Belanja modal meubelair sebesar Rp. 47.300.000,00 berupa kursi tunggu, kursi putar, meja rapat panjang, meja komputer, meja kerja kayu, kursi pelayanan, meja pelayanan.

Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp. 18.000.000,00 berupa AC sebanyak 4 unit.

Belanja modal home use sebesar Rp. 6.000.000,00 berupa televisi dan taplak meja panjang.

Belanja modal personal computer sebesar Rp. 15.000.000,00 berupa 2 set PC komputer.

Belanja modal peralatan personal komputer sebesar Rp. 3.000.000,00 berupa printer dot matrix.

Belanja modal gedung dan bangunan terdiri atas belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp. 19.797.000,00. Digunakan untuk merehab ruang pelayanan umum agar lebih nyaman saat menerima masyarakat yang mengajukan permohonan perijinan maupun non perijinan.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari kas dan setara kas dan persediaan sebagai berikut :

TABEL. III-3.2.1
RINCIAN ASET LANCAR PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Persediaan	8.881.650	5.504.467
Jumlah	8.881.650	5.504.467

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran OPD Kecamatan Sukodono yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL. III-3.2.2
MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2019 DAN 2018

1. Saldo 31 Desember 2018		Rp -
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	Rp 60.000.000	
- SP2D TUP	-	
- SP2D GU	Rp 719.553.342	
- Penerimaan PFK	-	
Jumlah Penerimaan		Rp 779.553.342
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	Rp 719.553.342	
- SPJ GU Nihil	Rp 49.501.435	
- Setor kembali sisa TUP		
- Setor kembali sisa UP/GU	Rp 10.498.565	
- Pengeluaran PFK		
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	Rp -	
Jumlah Pengeluaran		Rp 779.553.342
4. Saldo 31 Desember 2019		Rp -

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Persediaan	8.881.650	5.504.467

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir.

TABEL. III-3.2.3

LAPORAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2018		5.504.467
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		5.504.467
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2019	204.949.600	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0	
7	Jumlah tambahan persediaan (5+6)	204.949.600	
8	Dikurangi :		
9	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2018	0	
10	Jumlah tambahan persediaan bersih (7+9)		204,949,600
11	Jumlah persediaan yang siap digunakan		210,454,067
12	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(201,572,417)
13	Persediaan tahun 2019 (11+12)		8,881,650

TABEL. III-3.2.4

DAFTAR PERSEDIAAN TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Persediaan	2019	2018
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	7.008.550	3.404.467
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)	361.000	
3	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1.262.100	795.000
4	Persediaan Barang cetakan	250.000	1.305.000
	Jumlah	8.881.650	5.504.467

b. ASET TETAP

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Tetap	3.017.366.587	2.864.119.587

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

TABEL. III-3.2.5
DAFTAR MUTASI ASET TETAP'
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	526.666.667				526.666.667
2	Peralatan dan Mesin	779.024.000		133.450.000		912.474.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
3	Gedung dan Bangunan	1.558.428.920		19.797.000		1.578.225.920
4	Aset Tetap Lainnya					
	Jumlah	2.864.119.587		153.247.000		3.017.366.587

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

- Koreksi kurang catat Rp. 0,-
- Koreksi lebih catat Rp. 0,-

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp**153.247.000,-** meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. **153.247.000,-**;
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp. 0,-;
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. 0,-;
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar Opd sebesar Rp. 0,-;
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 0,- meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. 0,-;
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. 0,-; dan
 - (5) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar OPD sebesar Rp. 0,-;

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Tanah	526.666.667	526.666.667

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 526.666.667,00 dan Rp 526.666.667,00 terinci sebagai berikut :

TABEL. III-3.2.6

DAFTAR MUTASI ASET TETAP TANAH PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	526.666.667	-	-	-	526.666.667
	Jumlah	526.666.667	-	-	-	526.666.667

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	912.474.000	779.024.000

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 912.474.000,- dan Rp 779.024.000,00, terinci sebagai berikut :

TABEL. III-3.2.7

DAFTAR MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	Alat-alat besar	4.500.000		15.350.000	-	19.850.000
2	Alat-alat Angkutan	224.262.000		-	-	224.262.000
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	531.862.000		118.100.000	-	649.962.000
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	18.400.000		-	-	18.400.000
	Jumlah	779.024.00		133.450.000	-	912.474.000

Selanjutnya jelaskan :

- Tidak ada koreksi aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan sudah sesuai.
- Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari transaksi pembelian.
- Tidak terjadi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin disebabkan karena tidak adanya koreksi pada aset tetap peralatan dan mesin.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.578.225.920	1.558.428.920

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 mengalami penambahan sebesar Rp. 19.797.000 , dengan perincian sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL. III-17

DAFTAR PERKEMBANGAN JENIS ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNANPER 31 DESEMBER 2019

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.558.428.920		19.797.000		1.578.225.920
	Jumlah	1.558.428.920		19.797.000		1.578.225.920

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp. 0,-
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0,-

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 19.797.000

,- meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.19.797.000,-
- Penambahan dari hibah Rp. 0,-
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0,-

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,- sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 0,-
- Pengurangan karena dihibahkan Rp. 0,-
- Pengurangan karena

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Lainnya	17.440.000	17.440.000

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 17.440.000 sedangkan saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 17.440.000 terinci sebagai berikut :

TABEL. III-3.2.8

DAFTAR RINCIAN ASET LAINNYAPER 31 DESEMBER 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
1	Aset Lain lain	17.440.000	-	-	17.440.000
	Jumlah	17.440.000	-	-	17.440.000



d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp.44.314.953,- dan Rp.32.419.775,- diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	44.314.953,-	32.419.775,-

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 44.314.953,- dan Rp. 32.419.775,-. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang belanja.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Utang Belanja	44.314.953,-	32.419.775,-

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.44.314.953,- terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp.41.437.213,- utang belanja jasa Rp. 2.877.740,- sebagaimana tabel dibawah.



TABEL. III-3.2.9

RINCIAN UTANG TAHUN 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Utang Belanja pegawai	30.643.000	41.437.213	30.643.000	41.437.213
2	Utang Belanja Jasa	1.776.775	2.877.740	1.776.775	2.877.740
	Jumlah	32.419.775	44.314.953	32.419.775	44.314.953

Utang tersebut meliputi utang belanja pegawai yang merupakan Tambahan Perbaikan Penghasilan(TPP) ASN bulan Desember yang akan dibayarkan di Tahun 2020 sebesar Rp. 41.437.213, dan belanja jasa yang terdiri belanja listrik Rp. 2.127.390,- belanja internet sebesar Rp. 721.050,- dan belanja Air sebesar Rp. 29.300.

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp.41.437.213,00 merupakan kewajiban atas Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2019.

TABEL III-3.2.10

RINCIAN UTANG BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Tunjangan jabatan	490.000		490.000	
2	Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30.153.000	41.437.213	30.153.000	41.437.213
	Jumlah	30.643.000	41.437.213	30.643.000	41.437.213

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.877.740,- merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL III-3.2.11
RINCIAN UTANG BELANJA JASA TAHUN 2019

No	Jenis Utang	31-Des-18	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31-Des-19
1	Jasa listrik	987.540	2.127.390	987.540	2.127.390
2	Internet	759.935	721.050	759.935	721.050
3	PDAM	29300	29.300	29300	29.300
	Jumlah	1.776.775	2.877.740	1.776.775	2.877.740

e. EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Ekuitas	2.973.051.634,00	2.107.928.037,15

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

TABEL III-3.2.12
DAFTAR EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Jumlah Aset	3.017.366.587	2.140.347.812,15
2	Jumlah Kewajiban	44.314.953	32.419.775,00
3	Ekuitas (1-2)	2.973.051.634	2.107.928.037,15

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

TABEL III-3.2.13
DAFTAR RINCIAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	2.107.928.037,15	2.141.499.042,03
2	Surplus (Defisit) LO	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar		0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



6	Lain-Lain		0,00
7	RK-PPKD	2.404.987.181,00	2.034.372.122,00
4	EKUITAS AKHIR	2.153.991.669,74	2.107.928.037,15

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. BEBAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.377.791.617	1.160.381.863

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut.

TABEL III-5.3.1
PERHITUNGAN BEBAN PEGAWAI
TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Belanja Gaji Pegawai LRA	1.366.997.404	1.131.238.863
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai		490.000
Tunjangan Uang Makan 2018 belum di bayar		
Tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2019 belum dibayar	41.437.213	30.153.000
DIKURANGI : Utang Pegawai 2018 Yang Sudah Dibayar		
Pembayaran Tunjangan Uang Makan 2018	(30.643.000)	(1.500.000)
Jumlah Belanja Pegawai - LO	1.377.791.617	1.160.381.863

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	826.932.279	800.614.303

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

TABEL III
BEBAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Persediaan	201.572.417	100.133.533
2	Beban Jasa	467.859.552	540.983.070
3	Beban Pemeliharaan	69.958.900	89.977.700
4	Beban Perjalanan Dinas	81.537.500	69.520.000
	Jumlah	820.928.369	800.614.303

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Beban Persediaan	201.572.417	100.133.533

Beban persediaan mencerminkan barang-barangpersediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut.

TABEL
DAFTAR RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN 2019 DAN 2018

	Keterangan	2019	2018
1	Belanja Persediaan LRA	204.949.600	104.754.500
	<i>Ditambah</i>		
2	Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	5.504.467	883.500,00
3	Koreksi persediaan awal		
4	Beban persediaan 2018 yang masih harus di bayar		
5	Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5)	5.504.467	883.500,00
6	Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+6)	210.454.067	105.638.000
7	<i>Dikurangi</i>		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



	Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	8.881.650	5.504.467
8	Pembayaran utang belanja tahun lalu		
9	Jumlah Pengurangan (7+8+9)	8.881.650	5.504.467
	Beban Persediaan (6+10)	201.572.417	100.133.533

TABEL1.
DAFTAR RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban alat tulis kantor	18.883.917	17.479.033
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	1.639.000	2.800.000
3	Beban Perangko, materai, dan benda pos lainnya	750.000	780.000
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.720.900	1.965.000
5	Beban cetak dan penggandaan	9.303.600	7.349.500
6	Beban makanan dan minuman rapat	72,575,000	161.985.000 -
7	Beban Makanan dan Minuman kegiatan tertentu	44,550,000	-
8	Beban pakaian khusus	8,050,000	69.960.000
9	Beban Pakaian kegiatan tertentu	41,100,000	-
10	Beban hadiah barang	2,000,000	-
11	Beban Alat Rumah Tangga	-	6.800.000
	Jumlah	201.572.417	100.133.533

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Beban Jasa	467.859.552	540.983.070

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, dan beban jasa lainnya, terinci sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL2.
DAFTAR RINCIAN BEBAN JASA
TAHUN 2019 DAN 2018

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Jasa Kantor	38,518,736	142.548.070,-
4	Beban Dekorasi	8,600,000	
5	Beban Penggantian Transport	9,450,000	
6	Beban jasa instruktur/ narasumber/ tenaga ahli	2,700,000	
7	Beban Jasa Pendukung kegiatan	400,000	
8	Beban jasa juri/wasit	3,000,000	
9	Beban sewa sarana mobilitas darat	1,400,000	900.000,-
10	Beban sewa alat studio	1,500,000	
11	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	3,000,000	1.500.000,-
12	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2,130,816	
13	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	397,160,000	234.050.000,-
15	Beban makanan dan minuman rapat		132.510.000
16	Beban Makanan dan Minuman kegiatan tertentu		29.475.000
	JUMLAH	467.859.552	540.983.070,-

Beban jasa untuk tahun 2019 sebesar Rp. 467.859.552 meliputi belanja jasa tahun 2019 sebesar Rp. 467.859.552 ditambah hutang jasa tahun 2018 yang harus dibayar Rp.1.776.775 merupakan hutang listrik, telpon, airdan internet dikurangi hutang tahun 2019 yang belum dibayar Rp.2.877.740,00.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	69,958,900	89.977.700

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2019 dan 2018 terinci sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL3.
DAFTAR RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN
TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	52,358,900	48.037.700,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	4,200,000	3.000.000,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer	13,400,000	12.440.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		19.350.000,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung		7.150.000,00
	Jumlah	69,958,900	89.977.700,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	81.537.500	69.520.000

Beban perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut:

TABEL4.
DAFTAR BEBAN PERJALANAN DINAS
TAHUN 2019 DAN 2018

No	Beban Perjalanan Dinas	2019	2018
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	62.337.500	36.345.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	19.200.000	33.175.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	81.537.500	69.520.000,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(e) Beban Lainnya	18.750.000	-

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel. Beban lainnya tahun 2019 dan 2018 terinci sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL5.
DAFTAR RINCIAN BEBAN LAIN-LAIN LRA DAN LO
TAHUN 2019

No	Uraian	Jumlah	
BELANJA LAINNYA - LRA		0,-	0,-
PENAMBAHAN			
1	Beban 2018 belum dibayar	0,-	0,-
2	Reklasifikasi Belanja Modal ke belanja/beban lainnya (barang ekstrakomtabel) karena tidak menambah aset tetap	0,-	0,-
3	Reklasifikasi dari Belanja Modal (aset tetap) ke barang ekstrakomtabel	18.750.000	0,-
PENGURANGAN :			
1	Reklasifikasi belanja/beban lainnya menambah aset tetap	0,-	0,-
BEBAN LAINNYA LO		18.750.000	0,-

TABEL6.
DAFTAR RINCIAN BEBAN LAIN-LAIN
(BEBAN ATAS BARANG – BARANG EKSTRAKOMTABEL)
TAHUN 2019 DAN 2018

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	2019	2018
1	Belanja Meubelair	18.000.000	0,-
2	Belanja Home use	750.000	
	Jumlah	18.750.000	0,-

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	98.665.372,41	90.299.752,84,-

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 dan 2018 terinci sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



TABEL7.
DAFTAR BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
TAHUN 2019 DAN 2018

No	Beban Penyusutan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.597.900	58.662.650,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.067.472,41	31.637.102,84
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan		0,00
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
5	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
	Jumlah	98.665.372,41	90.299.752,84

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional sebagai berikut.

TABEL8.
RINCIAN SURPLUS (DEFISIT) LOTAHUN 2019 DAN 2018

No	Surplus (defisit)	2019	2018
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)
2	Surplus (Defisit) Non Operasional		0,-
3	Pos Luar Biasa		0,-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a. Ekuitas Awal	2.107.928.037,15	73.555.915,15

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 2.107.928.037,15 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2018 sebesar 2.141.499.042,03 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2017 *audited*.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut :

TABEL9
SURPLUS/DEFISIT LO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	(2.358.923.548,41)	2.051.295.918,84
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional		0,00
5	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	-	(16.647.208,04,-)

Pada tahun 2019 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas tahun 2018 yang berdampak pada penurunan ekuitas sebesar Rp.0. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal sebesar 0,- antara lain:

- 1) Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,-;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- 2) Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rp. 0,-;
- 3) Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp. 0,-;
- 4) Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 0,-;
- 5) Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0,-;
- 6) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp.0,-;
- 7) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp.0;
- 8) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. 0,-;
- 9) Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi Rp. 0,-;
- 10) Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Rp. 0,-;
- 11) Koreksi Nilai Aset Lain-lain Rp. 0,-;

1) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp.0,-)

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp.0,-) sehingga tidak berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

TABEL10.
KOREKSI NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN
dalam rupiah

NO	OPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sukodono	-	
	Jumlah	-	

2) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp.0)

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp.0) sehingga tidak berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

TABEL11.
KOREKSI NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	OPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sukodono	-	
	Jumlah	-	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



3) **Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut :

TABEL12.
KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN

dalam rupiah

NO	OPD	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Sukodono	0	0
	Jumlah	0	0

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
c. Ekuitas Akhir	2.153.991.669,74	73.555.915,15

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

TABEL13.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	2.107.928.037,15	2.141.499.042,03
2	Surplus (Defisit) LO	(2.358.923.548,41)	(2.051.295.918,84)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	-	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	0,00
6	Lain-Lain	-	(16.647.208,04)
7	RK-PPKD	2.404.987.181,00	2.034.372.122,00
4	EKUITAS AKHIR	2.153.991.669,74	2.107.928.037,15



BAB IV INFORMASI DAN KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga .Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan



bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut(turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 (1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 (1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 (1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 (1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 (1973);
- 6) Suwandi (1973 (1983);
- 7) Karsid (1983 (1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 (1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 (1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 (2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2013 (2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018)
- 15) H. Thoriqul Haq, M.ML dan Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si (2018-2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada



- pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
 - 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori



sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3 /4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumpalsuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya). Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.



f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20 Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi(fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.



BAB V

P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Sukodono tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kecamatan Sukodono dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sukodono berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sukodono
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kecamatan Sukodono kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sukodono pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kecamatan Sukodono tahun 2019 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.

- (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.
 - (7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan Kecamatan Sukodono tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.